



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SAWAHLUNTO**

TAHUN 2021 – 2023



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023 disusun untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan pertanian di Kota Sawahlunto selama 3 (tiga) tahun terakhir yang merupakan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.

Upaya mencapai target utama pembangunan pertanian tentu tidaklah mudah, karena dihadapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian yang tidak ringan, di samping juga gerak dinamika lingkungan strategis lokal yang semakin kompleks. Untuk menghadapi kondisi tersebut maka dibutuhkan peran serta aktif seluruh pelaksana pembangunan pertanian, mulai dari pemerintah, masyarakat dan stake holder.

Dengan adanya Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini secara substansi dapat sebagai cerminan pembangunan pertanian yang dibutuhkan dengan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang ingin diwujudkan.

Sawahlunto, Desember 2021
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SAWAHLUNTO**

HENI PURWANINGSIH, SP.MP
NIP. 19711022 201001 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.2.1. Sumber daya manusia	10
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD... ..	27
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
5.1. Strategi dan Kebijakan.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39

6.1.	Rencana Program dan Kegiatan	39
6.2.	Rencana Program & Kegiatan Perubahan	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		43
7.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	43
7.2.	Rencana Indikator Kinerja Utama	46
BAB VIII PENUTUP		47
8.1.	KAIDAH PELAKSANAAN	47
8.2.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI	50
LAMPIRAN		52
1.	Cascading Kinerja	52
2.	SK Kepala OPD Tentang Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA DKP3 Tahun 2018 – 2023 ...	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen publik yang memberi gambaran perencanaan pelayanan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berperan strategis menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Dokumen Perubahan renstra ini disusun dikarenakan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan program kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana untuk penyusunannya memperhatikan kepentingan masyarakat, perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan provinsi dan pusat sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian dan perikanan periode 2018-2023 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik dalam maupun antar sektor terkait.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan dimana setiap Kabupaten/Kota diwajibkan membuat RPJPD dan RPJMD dan setiap OPD membuat RENSTRA sebagai penjabaran dari RPJMD setiap 5 tahun dimana ditegaskan daerah wajib membuat RPJM paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana dan Pembangunan Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Renstra disusun berpedoman pada dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan kewenangan dan Tupoksi dari masing-masing OPD untuk jangka waktu lima tahun.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah Kota Sawahlunto baik langsung seperti dalam pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan pangan, maupun tidak langsung melalui peningkatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peranan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian fasilitasi bagi pelaksana pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan utama bagi jajaran lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya Renstra ini dijadikan acuan pula dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Renstra Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi acuan dan arahan bagi Dinas kedepan (2018-2023) yang dilaksanakan

secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD periode tahunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Propinsi yang menangani bidang Pangan, Pertanian, Perikanan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto, serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi kinerja Periode 2013-2018, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Pangan, pertanian, dan Perikanan baik pada tingkat global, nasional, maupun regional.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto tahun 2018 - 2023 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan unit kerja teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/HK.140/4/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perikanan dan Kelautan Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang lasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16).
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5).
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31).
- Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Sawahlunto.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan disusun dengan maksud memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan perikanan
2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan diusulkan dibiayai APBD Kota sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
3. Menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan strategis bidang-bidang dan perangkat dinas lainnya.
4. Membangun sistem akuntabilitas Dinas sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan tugas.
5. Sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas yang merupakan akumulasi dari bidang-bidang, perangkat dinas dan stakeholders dilingkup Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BABVIII. Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta tugas pembantuan, dengan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas Pemerintahan di subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan, meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan serta menyusun program kerja.
- Mengkoordinasi, mengendalikan, mengawasi dan membina semua kegiatan di bidang pertanian.
- Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 bernama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dengan Struktur Organisasi baru sebagai berikut :

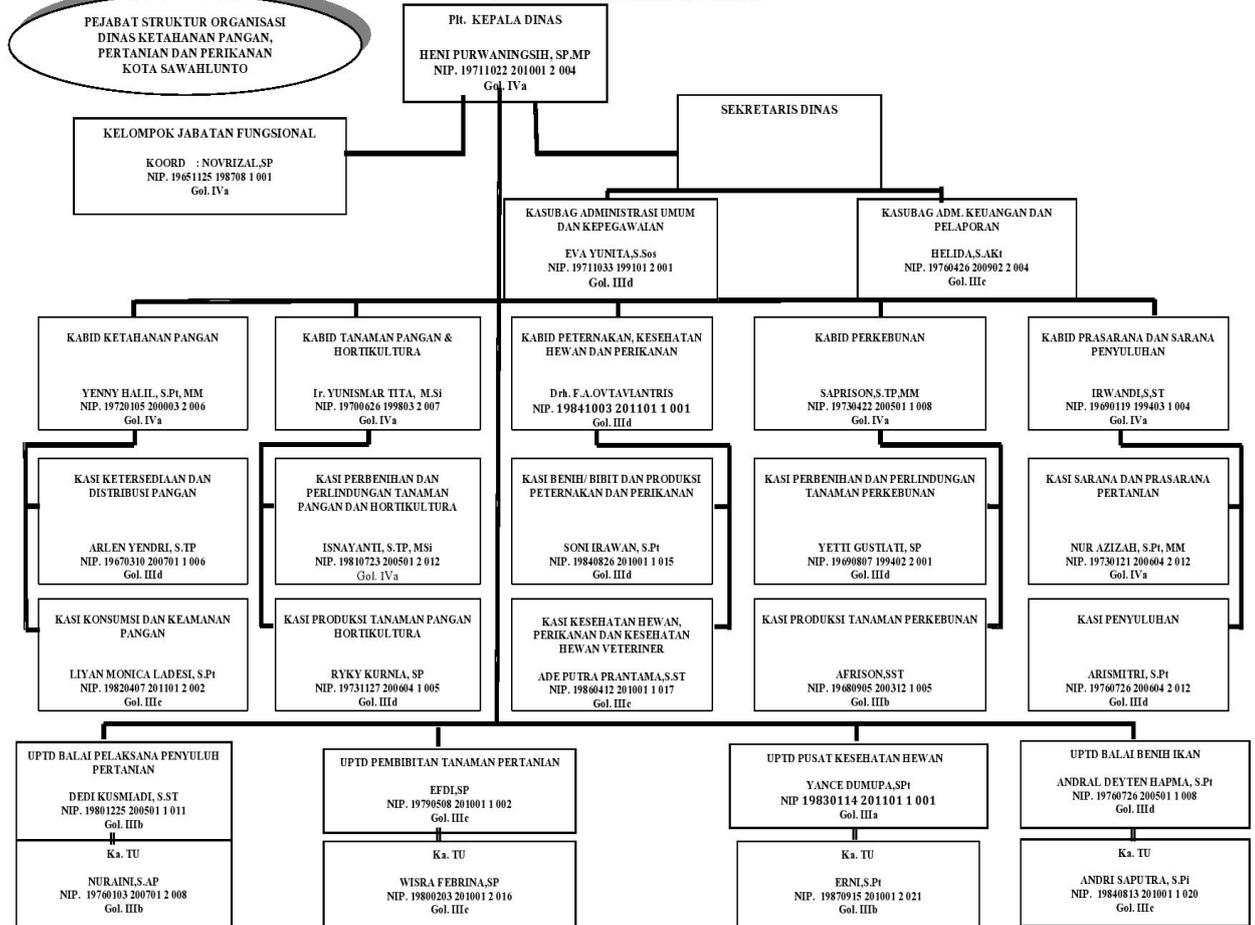
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - A. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - B. Sub Bagian Administrasi Keuangan & Pelaporan

3. Bidang Ketahanan Pangan
 - A. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - B. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - A. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - B. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
 - A. Seksi Benih/ Bibit dan Produksi Peternakan dan Perikanan
 - B. Seksi Kesehatan Hewan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Veteriner
6. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
 - A. Seksi Penyuluhan
 - B. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian
7. Bidang Perkebunan
 - A. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - B. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan Tanaman, UPTD Pelaksana Penyuluh Pertanian.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Kondisi Desember 2021
Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber daya manusia

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan keadaan pada bulan Desember 2021 adalah sebanyak 128 orang dengan deskripsi (klasifikasi) sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Aparatur DKP3

No	Kategori	Jumlah (Org)		Laki-laki (Org)	Perempuan (Org)	PENDIDIKAN							
						SD	SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2	S3
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	76											
	Struktural	Eselon II	1		1							1	

		Eselon III	4	3	1					2	2		
		Eselon IV	19	10	9					15	4		
	Fungsional	Gol IV	9	3	6					9			
		Gol III	21	4	17					21			
		Gol II	4	4				1		3			
		Gol I											
	Pelaksana	Gol III	7	1	6			1		6			
		Gol II	5	2	3			3		2			
		Gol I	2	1	1	2							
2	Pegawai Tidak tetap dengan NRPTT		14	4	10			4		2	8		
3	Pegawai Tidak tetap Non NRPTT		32	12	20		3	16	1	2	10		
4	Pegawai P3K Provinsi		1	1				2					
5	Pegawai P3K Kota Sawahlunto		5	2	3			3			2		
6	Pegawai PNS Provinsi		2	2				1			1		
7	Pegawai penuluh Perikanan Pusat		2	1	1						2		
	Jumlah		128	50	78	2	3	30	1	9	76	7	0

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan fungsinya memiliki sejumlah sarana prasarana berupa Aset dan Unit Usaha yang masih operasional. Aset/Modal DKP3 per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar Aset DKP3 Kota Sawahlunto per 31-12-2021

NO	NAMA DAN JENIS BARANG	NILAI TH. 2021
1	TANAH	4.238.040.000,00
1.01	TANAH	4.238.040.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	7.337.760.919,24
2.01	ALAT BESAR	88.164.623,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.114.147.939,00

	2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	309.314.600,00
	2.04	ALAT PERTANIAN	976.338.750,00
	2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.405.605.970,72
	2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	714.870.200,00
	2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	78.682.690,00
	2.08	ALAT LABORATORIUM	288.889.150,00
	2.09	ALAT PERSENJATAAN	29.326.400,00
	2.10	KOMPUTER	1.302.441.210,00
	2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	29.979.386,52
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	7.818.734.183,00
	3.01	BANGUNAN GEDUNG	7.818.734.183,00
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6.292.206.883,20
	4.01	JALAN DAN JEMBATAN	2.037.478.207,00
	4.02	BANGUNAN AIR	4.006.625.176,20
	4.03	INSTALASI	248.103.500,00
5		ASET TETAP LAINNYA	150.164.850,00
	5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.057.350,00
	5.04	BIOTA PERAIRAN	136.107.500,00
6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
		JUMLAH	25.836.906.835,44

Sedangkan unit usaha yang masih operasional baik merupakan pelayanan maupun memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Kebun Buah Kandi
- b. Rumah Potong Hewan (RPH/TPH)
- c. Balai Benih Ikan
- d. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
- e. Balai Penyuluhan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto berdasarkan sasaran/target Renstra periode tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Beberapa usaha yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya peningkatan tercapainya target indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana prasarana pertanian berupa perbaikan jaringan irigasi, bantuan pupuk, jalan usaha tani, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), penyediaan bibit tanaman seperti sayuran (kangkung darat, bayam, kacang panjang, buncis, terung, salada, pare, cabe, dan tomat), benih padi, buah-buahan (manggis dan durian), dan bibit pinang yang dibagikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma.

2. Bantuan pengembangan perikanan kepada masyarakat (modal dan benih ikan) serta peningkatan penyuluhan kepada peternak ikan.
3. Banyak masyarakat membuka areal perkebunan karet karena yang disebabkan oleh adanya penyediaan bibit tanaman karet pemerintah kota secara cuma-cuma kepada masyarakat.
4. Terbentuknya kawasan kebun buah di Kandih seluas 3,1 ha. Kebun buah ini ditujukan bukan saja sebagai kebun tapi juga sebagai tempat rekreasi, edukasi dan reklamasi lahan bekas tambang.
5. Peningkatan SDM petani dan masyarakat melalui pelatihan teknis, studi banding dan magang.
6. Pelatihan teknis, magang, studi banding bagi aparatur pertanian guna mengiringi kemajuan informasi dan teknologi.
7. Peningkatan pelayanan, pembinaan & penyuluhan kepada masyarakat untuk merubah pola pikir dan perilaku berusaha tani untuk dapat menerima kemajuan teknologi & informasi pertanian serta mengarahkan orientasi usaha petani/peternak ke agribisnis.
8. Adanya dukungan pemerintah kota untuk menggerakkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, salah satu sarannya adalah sektor pertanian dengan penyediaan modal.

Disamping itu juga tersedia dana pembangunan pertanian dan perikanan dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat.

Adapun capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Dapat dilihat indikator kinerja utama 2018 s/d 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian Kinerja 2018 s/d 2020

INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN		
	2018	2019	2020

	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	321.300,27	312.007,01	97,11	335.758,78	325.354,30	96,90	350.867,92	326.224,79	92,98
Produktifitas Panen Padi (IKU)	4,69	4,69	100,00	4,75	5,16	108,63	4,80	5,16	107,50
Produktifitas Panen Karet ((IKU)	1,25	1,25	100,00	1,26	1,282	101,75	1,265	1,277	100,95
Produktifitas Panen Kakao (IKU)	1,06	1,06	100,00	1,07	1,08	100,93	1,08	1,14	105,56
Prosentase Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (IKU)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
Produktifitas Kolam Budidaya (IKU)	0,31	0,31	100,00	0,32	0,34	106,25	0,33	0,53	160,61
Index Penanaman (IP) (IKU)	2,23	2,23	100,00	2,24	2,14	95,54	2,25	2,07	92,00
Petani dan Petugas yang berprestasi (IKU)	7	7	100,00	7	14	200,00	7	10	142,86
Score Pola Pangan Harapan (PPH) (IKU)	86,2	86,2	100,00	86,3	86,5	100,23	86,4	83,7	96,88

Faktor- faktor penghambat tidak tercapainya target pada indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Lebih besar luas lahan tadah hujan 878 Ha dari pada luas lahan irigasi 693 Ha
2. Terjadinya kerusakan dan alih fungsi lahan sawah karena penggunaan dan kepentingan diluar pertanian
3. Ditemukannya residu pestisida, penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan segar dan pangan olahan.
4. Rendahnya penggunaan benih unggul bersertifikasi

5. Masih kurangnya sarana prasarana pertanian (irigasi, jalan dan sarana produksi lainna).
6. Masih kurangnya diversifikasi dan konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan Aman) berbasis pangan lokal
7. Masih rendahnya motifasi petani dalam berusaha tani dan beternak
8. Masih rendah pertambahan populasi ternak.
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kebuntingan & kesehatan alat reproduksi ternak.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2020 yang menjadi kewenangan perangkat daerah disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Dari tabel 2.2 di atas, dapat dianalisa bahwa rasio antara realisasi dan anggaran untuk Pendapatan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 28,65 % dibandingkan tahun 2018 dikarenakan tidak tercapainya target Retribusi Tempat Rekreasi akibat berkurangnya pengunjung karena bertambahnya objek wisata baru

di Sawahlunto, dan untuk belanja rasio antara realisasi dan anggaran mengalami penurunan sebesar 2,93 % tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 4,53 % dibandingkan tahun 2019.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah

Tantangan :

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.
2. SDM Pengelola Ketahanan Pangan masih kurang secara kuantitas.
3. Ketersediaan pangan lokal belum mencukupi kebutuhan pangan ideal.
4. Kondisi infrastruktur dan sarana penunjang ketahanan pangan masih kurang.
5. Produksi benih masih sedikit.
6. Kuantitas SDM kurang.
7. Produktifitas perikanan rendah.
8. Masih Adanya Lahan Pertanian yang belum tergarap secara maksimal.
9. Kuantitas Sarana belum memadai.
10. Mayoritas lahan merupakan lahan kurang subur.
11. Rendahnya produktifitas tenaga kerja sektor pertanian.
12. Keterampilan petani belum memadai.
13. Industri pengolahan hasil pertanian yang relatif minim.
14. Produktifitas hasil pertanian masih rendah.

Peluang :

1. Adanya teknologi peningkatan kualitas produksi tanaman pangan.
2. Akses dan pasokan pangan dari daerah sekitar lancar.
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan .
4. UU 41/2009 tentang Lahan Pangan Berkelanjutan.
5. Ketersediaan energi protein melalui penguatan cadangan pangan.
6. Lahan Petani ikan masih tersedia.
7. Sektor pertanian merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja tinggi.
8. Tersedianya berbagai skim kredit Perbankan.
9. Dukungan Dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
10. Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga pertanian vertikal

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Konsep pembangunan pertanian disamping untuk memenuhi kebutuhan pangan, peningkatan produksi dan produktifitas juga diharapkan meningkatkan taraf hidup petani dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan petani/kelompok tani.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor pangan, pertanian dan perikanan terdapat peluang yang harus dioptimalkan dan tantangan/gangguan yang harus diatasi agar tidak menghambat pembangunan bidang pertanian.

Berbagai peluang dan tantangan memunculkan permasalahan yang telah diidentifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I Bidang Ketahanan Pangan			
1.	Belum maksimalnya pemanfaatan pekarangan sekitar rumah	Masih banyaknya lahan pekarangan yang dibiarkan kosong dan tidak produktif	Masih kurangnya minat masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan sekitar rumah
		Masyarakat khususnya Ibu rumah tangga yang belum memaksimalkan waktu luangnya untuk melakukan usaha khususnya di bidang pertanian keluarga	Para stakeholder terkait belum berperan aktif memberikan motivasi kepada masyarakat guna memanfaatkan pekarangan
2.	Ketersediaan dan kebutuhan pangan yang masih didatangkan dari luar daerah kecuali beras	Lahan dan lokasi yang tersedia untuk berusaha dibidang pertanian khususnya peternakan, perikanan dan sayuran dan belum diolah secara maksimal dan berkesinambungan	Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana produksi untuk berusaha di bidang pertanian
			Belum diterapkan teknologi pengolahan dan budidaya yang sesuai dengan kondisi lokal

3.	Kurangnya tersedianya dukungan anggaran dari APBDes/Kel	Tidak dianggarkan dalam anggaran dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan	Masih minimnya stakeholder dibidang pangan yang dilibatkan dalam penyusunan RPJM/RPTK Desa/Kel
		Belum diakomodasi kebutuhan dana dan kegiatan dalam RPJM/RPTK Desa/Kel	Stakeholder dibidang yang belum berpartisipasi aktif menuntaskan permasalahan pangan
4.	SDM pelaku usaha pangan yang masih rendah	SDM pelaku usaha pangan yang kurang bisa dikembangkan	Kurangnya pengetahuan dan kemampuan berusaha
		Kualitas teknologi pangan yang masih terbelakang (konvensional)	Belum tersedianya teknologi pangan yang bisa diandalkan untuk percepatan usaha
5.	Akses pasar yang terbatas	Petani Kota Sawahlunto yang umumnya petani kecil memiliki akses pasar terbatas sehingga petani hanya bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga murah di pasar local	Teknologi informatika yang belum maksimal di wilayah petani
			Masih kurang dilakukan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam usaha pangan
6.	Keamanan dan kualitas pangan yang belum optimal	Masih ditemui kandungan zat berbahaya di atas ambang batas pada komoditas pangan khususnya pangan segar	Masih kurang kesadaran produsen/masyarakat untuk tidak menggunakan pemakaian zat berbahaya
II Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1.	Indeks Pertanaman (IP) padi sawah masih rendah	Jumlah luas tanam padi sawah/tanam masih rendah	55,9% luas lahan sawah adalah sawah tadah hujan
			Banyaknya jaringan irigasi yang rusak dan masih ada saluran irigasi yang belum permanen (tanah)
			Letak sawah yang diatas jaringan irigasi, sehingga dibutuhkan irigasi pipa
2.	Produksi belum Optimal	Pemakaian benih berlabel masih rendah	Masih kurangnya minat petani untuk memakai benih berlabel
			Tidak tersediannya benih yang tepat waktu dan tepat jenis sesuai kebutuhan petani
		Pemupukan belum sesuai rekomendasi	Keterbatasan modal di tingkat petani

3	Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) mengurangi produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Masih kurangnya pemahaman petani dalam mengidentifikasi gejala serangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura	Kurangnya SDM petugas OPT (POPT)
III Bidang Perkebunan			
1.	Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mengurangi produksi tanaman perkebunan	Tingginya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terhadap tanaman perkebunan.	Rendahnya minat petani memanfaatkan pelayanan Call POPT Bidang Perkebunan DKP3 Sawahlunto.
			Rendahnya minat petani dalam pengadaan Racun/Insektisida/Pestisida yang digunakan dalam POPT.
2.	Minimnya pembinaan dan pendampingan teknis bagi petani komoditi tanaman perkebunan	Kurangnya pemahaman petani secara teknis dalam budidaya komoditi tanaman perkebunan	Kurangnya SDM petugas lapangan khusus dalam pendampingan budidaya komoditi tanaman perkebunan
			Kurang fokusnya pembinaan dan pendampingan teknis yang dilakukan terhadap petani komoditi tanaman perkebunan
3.	Budidaya komoditi perkebunan yang heterogen	Adanya keinginan petani untuk membudidayakan berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan	Tidak tersedianya lahan tanam yang ideal dan memadai untuk masing-masing
			Adanya peluang sumber bibit gratis bagi petani
4.	Adanya penggantian tanaman kakao dengan jenis komoditi tanaman lain	Kurangnya semangat petani dalam merawat dan memelihara tanaman kakao	Tingginya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terhadap tanaman kakao
			Kurangnya kegiatan Panen Sering, Pemangkasan, Sanitasi dan Pemupukan yang dilakukan petani kakao
5.	Rendahnya minat petani dalam budidaya tanaman sereh wangi	Kurangnya motivasi dan semangat petani sereh wangi dalam memaksimalkan budidaya tanaman sereh wangi	Rendah dan tidak stabilnya harga minyak sereh wangi dipasaran
IV Bidang Prasarana Sarana Pertanian			

1.	Masih banyaknya sawah tidak terfasilitasi pengairan irigasi	Banyaknya irigasi dalam kondisi rusak dan belum terfasilitasi kedalam bentuk permanen	Tidak tersedianya anggaran yang memadai. 2) Kondisi alam (bencana alam). 3) rendahnya kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan dan 4) Faktor Tofografi alam
2.	Masih rendahnya tingkat penggunaan pupuk bersubsidi	Masih rendahnya pengetahuan tentang pupuk berimbang (penerapan belum maksimal)	Kurangnya percontohan penggunaan pupuk berimbang dalam peningkatan produksi
3.	Kelembagaan petani belum berfungsi sesuai harapan	Belum berperannya kelembagaan petani sebagai unit produksi, kelas belajar dan kerjasama	Pendampingan dan pembinaan belum optimal dan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat rendah
4.	Alokasi pupuk bersubsidi rendah dari pengusulan petani	Ketersediaan anggaran semakin menurun namun permintaan semakin tinggi	Harga pupuk non subsidi tinggi dan tingkat daya beli petani rendah
5.	Keterampilan dan skill tenaga penyuluh pertanian terbatas dalam penyuluhan pertanian	kurangnya pelatihan teknis jabatan fungsional sebagai bekal pelaksanaan tugas	sarana pelatihan semakin terbatas (jarang) sedangkan penyuluh diangkat tidak dari latar belakang penyuluhan
V	Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan		
1	Usaha peternakan dan perikanan belum menjadi usaha pokok masyarakat	Terbatasnya lahan peternakan dan hijauan pakan ternak serta permodalan	Usaha peternakan dan perikanan masih menjadi usaha sampingan/ tabungan keluarga
2	Keterampilan dan skill tenaga teknis peternakan, kesehatan hewan dan perikanan yang terbatas	Kurangnya pelatihan teknis bagi petugas teknis di lapangan	Semakin jarang pelatohan-pelatohan bagi peningkatan kualitas SDM petugas
3	Sulitnya akses pasar bagi komoditi peternakan dan perikanan	Pelaku usaha peternakan dan perikanan masih berskala kecil	Penjualan ternak hanya pada waktu-waktu tertentu

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Dimana Visi RPJMD adalah :

“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMATABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”.

Misi untuk mewujudkan Visi RPJMD adalah :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK.
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing tinggi, dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar.
4. Menghadirkan pemerintah yang baik, bersih dan inovatif.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan.
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai.
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan kota berbasis smartcity dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kota Sawahlunto dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat dari telaahan dari Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto

No	Visi/Misi/Program Kerja Walikota/Wakil Walikota	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Visi : Dengan Kebersamaan Kita	1. Melaksanakan tugas Pemerintahan di subsektor	1. Indeks Pertanaman (IP) padi sawah	55,9% luas lahan sawah adalah sawah tadah hujan.

<p>Wujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermatabat, Berkeadilan dan Sejahtera.</p>	<p>pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan, meliputi perencanaan dan perumusan kebijakan serta menyusun program kerja.</p>	<p>masih rendah.</p>	<p>Banyaknya jaringan irigasi yang rusak dan masih ada saluran irigasi yang belum permanen (tanah).</p>
<p>Misi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK.</p>	<p>2. Mengkoordinasi, mengendalikan, mengawasi dan membina semua kegiatan di bidang pertanian.</p>	<p>2. Produksi belum Optimal.</p>	<p>Letak sawah yang diatas jaringan irigasi, sehingga dibutuhkan irigasi pipa.</p>
	<p>3. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.</p>		<p>Masih kurangnya minat petani untuk memakai benih berlabel.</p>
	<p>3. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) mengurangi produksi</p>	<p>Tidak tersediannya benih yang tepat waktu dan tepat jenis sesuai kebutuhan petani. Keterbatasan modal di tingkat petani.</p>	<p>Rendahnya minat petani memanfaatkan pelayanan Call POPT Bidang Perkebunan DKP3 Sawahlunto.</p>

			Tanaman Pangan dan Hortikultura dan produksi tanaman perkebunan	Rendahnya minat petani dalam pengadaan Racun/Insektisida/ Pestisida yang digunakan dalam POPT.
			4. Kelembagaan Petani belum berfungsi sesuai harapan	Pendampingan dan Pembinaan belum optimal dan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat rendah
			5. Keterampilan dan skill tenaga penyuluh pertanian, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan yang terbatas dalam penyuluhan	Semakin jarangya pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM petugas dan penyuluh diangkat tidak dari latar belakang penyuluhan
			6. Akses Pasar yang Terbatas	Petani Kota Sawahlunto yang umumnya petani kecil memiliki Penjualan ternak hanya pada waktu-waktu tertentu
			7. Keamanan dan Kualitas Pangan yang Belum Optimal	Masih kurangnya kesadaran produsen/masyarakat untuk tidak menggunakan pemakaian zat berbahaya.
			8. SDM pelaku usaha pangan yang masih rendah	Kurangnya pengetahuan dan kemampuan berusaha
			9. Alokasi pupuk bersubsidi rendah dari pengusulan	Ketersediaan anggaran semakin menurun namun permintaan semakin tinggi

			petani	
			10. Usaha peternakan dan perikanan belum menjadi usaha pokok masyarakat	Usaha peternakan dan perikanan masih menjadi usaha sampingan/ tabungan keluarga

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto terkait dengan :

1. Tingkat Kementerian, dengan 2 Kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Tingkat Propinsi, terkait dengan beberapa Dinas/instansi, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura (BPTPH), Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV).

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (sesuai RPJP) adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi

pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomis berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ketiga dan ketujuh dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi dan Misi :	1 Melaksanakan tugas Pemerintahan di subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan, meliputi	1 Masih rendahnya penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	1 Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal
	Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			2 Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja
1	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas		2 Terbatasnya sarana dan prasarana	3 Sistem penyuluhan yang masih lemah

	pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.		perencanaan dan perumusan kebijakan serta menyusun program kerja.		penunjang produksi pertanian, akses petani terhadap pupuk, sarana produksi pemasaran dan permodalan serta kelembagaan petani	4	Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran
2	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	2	Mengkoordinasi, mengendalikan, mengawasi dan membina semua kegiatan di bidang pertanian.	3	Masih rendahnya tingkat pendapatan petani pertanian, peternakan dan perikanan.	5	Rendahnya pendidikan petani dan kelompok sasaran
			3	Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.	4	Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan petani	6
		5			Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian		
		6			Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditi		
		7			Dampak perubahan iklim dan serangan OPT terhadap Peningkatan Produksi		
						7	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Untuk Kota Sawahlunto pengembangan kawasan sentra produksi pertanian dibagi menjadi :

- a. Kawasan tanaman pangan dan hortikultura
- b. Kawasan Perkebunan
- c. Kawasan Peternakan
- d. Kawasan Agrowisata

3.4.2 Kawasan Sentra Produksi (KSP) Perikanan

Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

3.4.3 Kawasan Pengembangan Lingkungan Agrowisata

Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik potensial berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budidaya masyarakat pertanian. Kota Sawahlunto mempunyai kawasan agrowisata dengan komoditi tanaman hortikultura dengan lokasi Kebun Buah Kandi, Desa Salak Kecamatan Talawi.

Berikut ini tabel yang menyajikan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tabel 3.4
Telaahan RTRW Dan KLHS Pada RPJMD

No	Kebijakan RTRWKLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola Ruang dan Struktur ruang RTRW	Kawasan Komoditas Hortikultura dan Perkebunan	Masih rendahnya penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas hortikultura dan Perkebunan	Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal
				Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja
			Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang	Sistem penyuluhan

			peningkatan produksi pertanian, pemasaran dan permodalan serta kelembagaan petani	Kurang terbukanya akses/ jaringan pemasaran
				SDM petani dan kelompok sasaran
		Kawasan Peternakan	Masih rendahnya motivasi petani dalam berusaha ternak	Kurangnya permodalan bagi peternak
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk beternak secara baik	Sikap dan perilaku
II	KLHS			

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai institusi yang menangani pelayanan pembangunan pada sektor pertanian dan perikanan secara umum diharapkan mempunyai peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam perencanaan pembangunan pertanian dan perikanan harus memperhatikan aspek kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman. Adapun Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto yaitu :

1. Lebih besar luas lahan tadah hujan 878 Ha dari pada luas lahan irigasi 693 Ha
2. Ditemukannya residu pestisida, penggunaan bahan kimia berbahaya pada pangan segar dan pangan olahan.
3. Rendahnya penggunaan benih unggul bersertifikasi
4. Masih kurangnya sarana prasarana pertanian (irigasi, jalan dan sarana produksi lainna).
5. Masih kurangnya diversifikasi dan konsumsi masyarakat yang B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan Aman) berbasis pangan lokal
6. Masih rendahnya motifasi petani dalam berusaha tani dan beternak

7. Masih rendahnya motivasi petani dalam berusaha tani dan beternak
8. +Masih rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kebuntingan & kesehatan alat reproduksi ternak.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto yang telah tercapai pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN								
				2018			2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan		PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	321.300,27	312.007,01	97,11	335.758,78	325.354,30	96,90	350.867,92	326.224,79	92,98
		Meningkatnya Produktifitas Hasil Tanaman/ternak dan Perikanan	Produktifitas Panen Padi (IKU)	4,69	4,69	100,00	4,75	5,16	108,63	4,80	5,16	107,50
			Produktifitas Panen Karet ((IKU)	1,25	1,25	100,00	1,26	1,282	101,75	1,265	1,277	100,95
			Produktifitas Panen Kakao (IKU)	1,06	1,06	100,00	1,07	1,08	100,93	1,08	1,14	105,56
			Prosentase Daging yang ASUH (Aman, Sehat,Utuh dan Halal) (IKU)	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
			Produktifitas Kolam Budidaya (IKU)	0,31	0,31	100,00	0,32	0,34	106,25	0,33	0,53	160,61
2		Meningkatnya kualitas Sarana Produksi Pertanian	Index Penanaman (IP) (IKU)	2,23	2,23	100,00	2,24	2,14	95,54	2,25	2,07	92,00
3		Meningkatnya kapasitas petani/petugas	Petani dan Petugas yang berprestasi (IKU)	7	7	100,00	7	14	200,00	7	10	142,86
4		Meningkatkan Ketahanan Pangan	Score Pola Pangan Harapan (PPH) (IKU)	86,2	86,2	100,00	86,3	86,5	100,23	86,4	83,7	96,88

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat sebagian besar capaian kinerja telah mencapai realisasi 100%, namun terdapat beberapa indikator yang belum tercapai seperti indeks penanaman pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 terjadinya bencana alam berupa banjir bandang di desa Kolok Mudik, Kolok nan Tuo dan Talago Gunung kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Sehingga menyebabkan tanaman padi yang terkena bencana seluas 31,92 ha. Sedangkan pada tahun 2020 disebabkan karena pada bulan oktober sampai dengan desember terjadinya anomali cuaca di kota Sawahlunto yang berarti kondisi tidak teraturnya

cuaca yang menyimpang dari keadaan normalnya secara rata-rata atau fenomena cuaca yang tidak seperti biasanya. Sehingga petani tidak dapat menanam padi dikarenakan kondisi tanah yang kering akibat tidak turun hujan.

Target kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto untuk tahun 2021-2023 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 4.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Definisi Operasional/Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja 2020	TARGET TAHUN			
						2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
1	Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (skor IKP)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	67,36	68,91	70,56	72,33	72,33
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Komposisi kelompok pangan yang berasal dari produksi dan pemasok dari luar yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan gizi lainnya	-	96,40	96,50	96,60	96,60
			Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya	83,70	84,00	85,00	86,00	86,00
			PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADBH sektor pertanian dan perikanan	326.224,79	329.730,34	336.849,19	344.355,30	344.355,30
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Produktifitas Padi (Ton GKG/Ha)	Jumlah Produksi (ton) /Luas lahan (ha)	4,68	5,15	5,16	4,85	4,85
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	(jml prod tanaman kakao th ini-jml prod tanaman kakao th lalu/jml prod tanaman kakao th lalu) x 100 %	0,07	0,15	0,17	0,17	0,17

		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet	(jml prod tanaman Karet th ini-jml prod tanaman Karet th lalu/jml prod tanaman Karet th lalu) x 100 %	23,48	0,04	0,05	0,057	0,057
		Presentase Peningkatan Produksi Daging Sapi	(jml prod daging sapi th ini-jml prod daging sapi th lalu/jml prod daging sapi th lalu) x 100 %	-0,73	0,32	0,90	1,18	1,18
		Presentase Peningkatan Produksi Daging Ayam	(jml prod daging ayam th ini-jml prod daging ayam th lalu/jml prod daging ayam th lalu) x 100 %	-2,59	5,5	7,70	7,14	7,14
		Persentase Peningkatan Produksi Ikan	(jml prod ikan th ini-jml prod ikan th lalu/jml prod ikan th lalu) x 100 %	-5,32	0,30	0,50	0,97	0,97
		Indeks Penanaman (IP)	Perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanam	2,07	2,08	2,09	2,10	2,10

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat adanya perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah dari tabel sebelumnya, terlihat dari jumlah indikator kinerja RPJMD yang sebelumnya satu indikator setelah perubahan menjadi dua indikator yaitu indeks ketahanan pangan (skor IKP) dan PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan (jutaan rupiah). Sasaran kinerja yang sebelumnya berjumlah empat sasaran menjadi dua sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak sembilan indikator.

Perubahan tersebut dikarenakan pada indikator sebelumnya untuk kegiatan di bidang Ketahanan Pangan tidak ada mendukung untuk terjadinya peningkatan PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan sehingga ditambahkan indikator yang sesuai untuk mencapai tujuan Ketahanan Pangan dengan indikator indeks ketahanan pangan (skor IKP).

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto sebelum perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sebelum Perubahan

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Produksi sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Produktifitas Hasil Tanaman/ternak dan perikanan.	Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan Memfasilitasi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan kepada masyarakat Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian serta peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial

2		Meningkatnya Kapasitas Petani/Petugas yang Berprestasi	Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	<p>Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan</p> <p>Melakukan Revitalisasi tanaman coklat dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak</p> <p>Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan</p> <p>Penguatan peran pendidikan dalam menanamkan persepsi positif bahwa profesi petani yang awalnya dianggap profesi yang “rendah” menjadi profesi yang terhormat dan bergengsi.</p> <p>Pembukaan akses lahan-lahan terlantar untuk petani atau calon petani sehingga dapat produktif.</p>
3		Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi Pertanian	Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana dan teknologi pertanian dan perikanan serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi

				Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial
4		Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Peningkatan kualitas konsumsi pangan.	Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran

Strategi dan kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Peningkatan produksi pangan berbasis lokal	Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan
				Meningkatnya ketersediaan pangan pada daera yang rawan pangan
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberagaman pangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan
				Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat

			Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan
2	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perkebunan	Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Laan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan
			Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana dan teknologi pertanian dan perikanan serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi
			Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian serta peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak
			Menigkatkan kualitas pengendalian hama tanaman
			Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian
			Mendorong hilirisasi industri hasil Pertanian, Peternakan dan perikanan
		Menguatkan kemitraan antaraemasaran petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran	
		Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat	

				Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaera-daerah potensial
				Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan
			Peningkatan kualitas budidaya peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan
				Meningkatkan kualitas pengolahan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat
				Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidayaan Ikan

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang berubah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto tidak begitu jauh berbeda dengan renstra sebelumnya. Perubahan terjadi karena adanya penambahan pada tujuan dinas yang sebelumnya adalah meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan menjadi meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Matrik realisasi pencapaian target Program, Indikator dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020 dijabarkan dalam tabel 6.1 berikut :

Realisasi target program dan kegiatan untuk tiga tahun terakhir yang telah mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Pengembangan data / informasi /statistik daerah
5. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
6. Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
8. Program Peningkatan kesejahteraan petani
9. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perikanan
11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Realisasi target program dan kegiatan untuk tiga tahun terakhir yang belum mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi Peternakan
2. Program Peningkatan Produksi Perikanan
3. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

Beberapa usaha yang telah dilakukan sehingga mempengaruhi terjadinya tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengadaan Pupuk NPK Phonska Plus sebanyak 55.500 kg untuk komoditi padi sawah seluas 370 ha.
2. Dilaksanakan kegiatan berupa pertemuan kegiatan dan rapat-rapat monitoring dan evaluasi bantuan pupuk dan Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman pangan.
3. Peningkatan Produksi Tanaman Padi melalui bantuan benih padi varietas Gadang Rumpun Kumbayau 9.375 kg yang di sebar untuk 49 kelompok tani serta peningkatan pembinaan dan penyuluhan budidaya padi sawah agar petani dapat menerapkan teknologi sesuai anjuran sehingga produksi dan produktifitas padi dapat ditingkatkan.
4. Terlaksananya perbanyakan benih Gadang Rumpun kelas NS 400 tangkai dan BS 50 kg.
5. Terlaksananya penangkaran benih padi Gadang Rumpun Kumbayau sebanyak 305 kg serta seleksi benih NS sebanyak 400 tangkai dan penangkaran benih padi Bujang Marantau kelas BR sebanyak 760 kg.
6. Penanggulangan dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Perkebunan berupa disediakannya pestisida dan terlaksananya penggantian ekor tupai untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan sebanyak 3.772 ekor.
7. Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Tanaman Kakao berupa pemangkasan dan sanitasi lahan yang diiringi dengan pemberian pupuk NPK phonska plus untuk petani kakao sebanyak 4.875 kg untuk 9.750 batang tanaman kakao (9,75 Ha).
8. Pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pertanian berupa penyediaan Alat Mesin Pertanian seperti Traktor R 2 Capung 4 unit, Alat penyiang gulma 5 unit, cultivator 6,5 HP 5 unit, cultivator 5,5 Hp 7 unit, Motor sprayer stik kecil 5 unit, Motor sprayer stik besar 9 unit.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi tidak tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pada produksi daging sapi realisasi 94.8%, hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah pemotongan hewan qurban tahun 2019 dengan jumlah pemotongan 669 ekor, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pemotongan sebanyak 614 ekor.
2. Pada produksi daging ayam realisasi 98.6%, sama halnya dengan produksi daging sapi, produksi daging ayam juga mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan karena pada masa pandemi peternak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan bibit / DOC ayam, dan disamping itu perusahaan sebagai mitra peternak tidak sanggup untuk memasukkan bibit ayam ke plasma mereka karena dikhawatirkan akan mengalami kerugian di saat pemasaran.
3. Realisasi target produksi ikan sebesar 95.3%. Ketidak tercapaian produksi ikan ini berkaitan dengan penurunan bibit tebar di kolam – kolam masyarakat. disamping itu adanya kekosongan usaha pembibitan / pembudidaya ikan di Kecamatan Talawi dan Barangin sampai beberapa bulan berturut-turut dan jumlah benih tebar realisasinya sebesar 98.8%.
4. Anggaran yang telah dialokasikan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian ini sejumlah Rp. 876.505.000,- untuk membangun irigasi sebanyak 5 (lima) unit tidak jadi dilaksanakan karena adanya Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 Bidang Pertanian untuk Kota Sawahlunto tidak ada dialokasikan pusat karena perubahan system dari Reguler ke Penugasan, sehingga prediksi akan dibangunnya irigasi pertanian tidak jadi dilaksanakan. Sehingga target kinerja untuk merubah sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi sebesar 15 % atau seluas 114, 3 Ha tidak dapat terealisasi karena Tidak Tersedianya Anggaran/dana.

6.2. Rencana Program & Kegiatan Perubahan

Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pemetaan yang dibuat dari Permendagri 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut adalah:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Realisasi indikator kinerja pembangunan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto dalam tiga tahun terakhir yang telah dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 7.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1 Awal
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal Kinerja 2017	CAPAIAN KINERJA TAHUN								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Produktifitas Panen Padi (IKU)	5,39	4,69	4,69	100,00	4,75	5,16	108,63	4,80	5,16	107,50
2	Produktifitas Panen Karet ((IKU)	1,25	1,25	1,25	100,00	1,26	1,28 2	101,75	1,26 5	1,27 7	100,95
3	Produktifitas Panen Kakao (IKU)	1,03	1,06	1,06	100,00	1,07	1,08	100,93	1,08	1,14	105,56

4	Prosentase Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (IKU)	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
5	Produktifitas Kolam Budidaya (IKU)	0,33	0,31	0,31	100,00	0,32	0,34	106,25	0,33	0,53	160,61
6	Index Penanaman (IP) (IKU)	2,12	2,23	2,23	100,00	2,24	2,14	95,54	2,25	2,07	92,00
7	Petani dan Petugas yang berprestasi (IKU)	8	7	7	100,00	7	14	200,00	7	10	142,86
8	Score Pola Pangan Harapan (PPH) (IKU)	87,3	86,2	86,2	100,00	86,3	86,5	100,23	86,4	83,7	96,88

Pada tabel 7.1 dapat dilihat sebanyak delapan indikator kinerja utama yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto, sebanyak 6 indikator telah mencapai target kinerja dan 2 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor penyebab keberhasilan dan penghambat kinerja, antara lain:

10. Produktivitas Panen Padi

- Peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan khususnya padi diperoleh melalui berbagai upaya seperti penggunaan benih unggul/berlabel, bantuan pupuk NPK dan Penyediaan pestisida untuk penanggulangan hama dan penyakit tanaman.
- Adanya kemauan masyarakat untuk menerima dan menerapkan anjuran teknis pertanian dalam berusaha tani.

11. Produktivitas Panen Karet dan Kakao

- Dukungan pemeliharaan kebun masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Adanya bimbingan dan arahan dari koordinator penyuluh, koordinator BPP kecamatan dan penyuluh pertanian wilayah binaan pada kegiatan pembinaan kelompok tani.

- Adanya petugas pengamat organisme pengganggu tumbuhan yang melakukan pembinaan tentang pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman.

12. Persentase Daging yang ASUH

Persentase Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) mencapai target dikarenakan sebagai berikut :

- Adanya pengelolaan RPH dan TPH yang pelaksanaannya sesuai SOP
- Adanya beberapa jenis ternak yang populasinya meningkat
- Tidak adanya terjadinya penyakit yang mewabah atau menular
- Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan yang continue dan efektif
- Terkontrol dan terpantaunya pemotongan dan hasil pemotongan hewan RPH dan TPH di Kota Sawahlunto
- Terkontrolnya peredaran daging/ hasil peternakan di pasar Sawahlunto.

13. Produktifitas Kolam Budidaya

Produktifitas kolam budidaya dapat mencapai target dikarenakan sebagai berikut:

- Adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan pada petani budidaya perikanan sebanyak sepuluh kelompok.
- Adanya kegiatan operasional balai benih ikan guna meningkatkan produksi ikan.
- Adanya penurunan luas kolam dari 62,63 ha menjadi 39,02 ha sehingga menyebabkan meningkatnya produktivitas kolam budidaya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Banyaknya sawah yang dimanfaatkan untuk mina padi atau palawija ikan dimasukkan kedalam data kolam sementara sekarang sudah tidak ada lagi.
 - Banyaknya kolam terpal baik bantuan dari pemerintah maupun pribadi sekarang hanya tinggal sedikit.
 - Banyaknya pengalihan fungsi dari kolam menjadi rumah.
 - Banyaknya kolam yang tidak bisa dimanfaatkan lagi karena rusak.

14. Indeks Penanaman

Rasio index penanaman sebesar 2,07 lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 2,25. Hal ini disebabkan karena pada bulan oktober sampai dengan desember terjadinya anomali cuaca di kota Sawahlunto yang berarti kondisi tidak teraturnya cuaca yang menyimpang dari keadaan normalnya secara rata-rata atau fenomena cuaca yang tidak seperti biasanya. Sehingga petani tidak dapat menanam padi dikarenakan kondisi tanah yang kering akibat tidak turun hujan.

6. Petani dan Petugas yang Berprestasi

- Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas penunjang kegiatan seperti kendaraan operasional, BBM, BOP.
- Adanya kesempatan untuk peningkatan pendidikan bagi penyuluh seperti diklat, bimtek dan peningkatan pendidikan formal.
- Adanya pertemuan rutin kelompok tani.
- Adanya dukungan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi petani seperti temu teknologi/pelatihan petani.

2. Skor Pola Pangan Harapan

Hal ini disebabkan karena daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi pangan rendah karena bangsa Indonesia bahkan dunia mengalami bencana pandemi virus-19 yang mengganggu seluruh aktivitas kehidupan manusia, mulai dari perekonomian, sosial, budaya, pendidikan dan semua sektor, sehingga konsumsi pangan secara kualitas dan kuantitas berkurang.

Berkurangnya pendapatan yang menyebabkan berkurangnya daya beli konsumsi pangan dan masyarakat lebih mengutamakan konsumsi pangan hanya untuk memenuhi kebutuhan lapar (asal kenyang), sehingga kualitas dan keberagaman konsumsi pangan berkurang. yang berakibat kepada tingkat konsumsi energi dan Skor PPH menurun.

7.2. Rencana Indikator Kinerja Utama

Adapun rencana Indikator Kinerja pembangunan urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan yang akan dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto dalam tiga tahun kedepan yang

direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sawahlunto 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 7.2 adalah sebagai berikut :

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023, merupakan aplikasi teknis, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012 - 2032, serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan terkait di tingkat Provinsi dan Nasional.

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 merupakan jabaran dari pelaksanaan program

pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 khususnya urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan merupakan pedoman penyusunan Renja dan perencanaan penganggaran OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023.

Renstra Perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kota Sawahlunto untuk tahun 2021 s/d 2023. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintah daerah urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
2. Penetapan target Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam Renstra Perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pada Forum SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan mempedomani Target Indikator Kinerja pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2021 - 2023
3. Renstra Perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023 dilaksanakan dengan koordinator Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
4. Renstra perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto tahun 2021 – 2023.
5. Program dan kegiatan dalam Renstra Perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023 adalah Program minimal dan wajib harus diikuti. OPD boleh menambah kegiatan lain

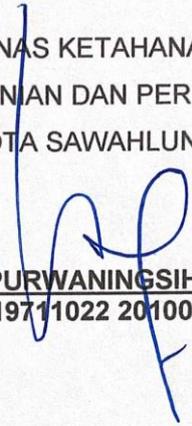
bila anggaran memungkinkan dengan prosedur penambahan melalui telaahan staf kepada Bapak Walikota yang dilengkapi proposal kegiatan, untuk dimasukkan kedalam Renja OPD;

6. Prosedur penambahan kegiatan pada Renja OPD yang belum dicantumkan pada Renstra Perubahan OPD seminimalnya harus memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2021 - 2023 dan/atau merupakan usulan dari masyarakat dengan alurnya harus dikoordinasikan dengan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

8.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Perubahan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2021 - 2023 oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah-BARENLITBANGDA) terhadap indikator kinerja Pembangunan dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode Renstra OPD.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA SAWAHLUNTO



HENI PURWANINGSIH, SP.MP
NIP. 19711022 201001 2 004

LAMPIRAN

- 1. Casceding Kinerja**
- 2. SK Kepala OPD Tentang Pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA DKP3 Tahun 2018 – 2023**